

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN
PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) (STUDI KASUS PADA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VI
MEDAN)**

OLEH :

ATIKAH HASANAH

NIM.0502173439

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN
PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) (STUDI KASUS PADA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VI
MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
pada Program Studi Akuntansi Syariah*

OLEH :

ATIKAH HASANAH

NIM.0502173439

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atikah Hasanah
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 31 Agustus 1998
NIM : 0502173439
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Jamin Ginting Kecamatan Medan Baru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan)** adalah benar karya asli saya atau penelitian saya dan bukan karya orang lain, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 27 Agustus 2021

Membuat Pernyataan



Atikah Hasanah

NIM. 0502173439

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN
PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) (STUDI KASUS PADA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VI
MEDAN)**

Oleh :

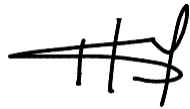
Atikah Hasanah

NIM. 0502173439

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Pada
Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 27 Agustus 2021

Pembimbing 1



Hendra Harmain, SE., M.Pd

NIDN.2010057302

Pembimbing 2



Nurwani, M.Si

NIDN. 0126038901

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, M.A

NIDN. 2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VI MEDAN)**” an. Atikah Hasanah, NIM 0502173439 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 2 September 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

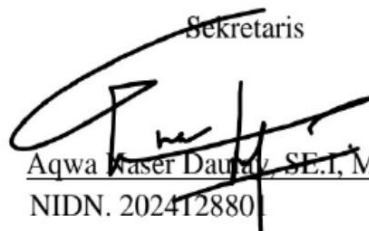
Medan, 2 September 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Prodi
Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua



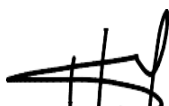
Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Sekretaris

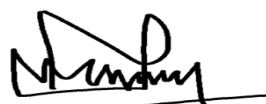


Aqwa Waser Dauni, SE.I, M.Si
NIDN. 202412880

Anggota



1. Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302



2. Nurwani, M.Si
NIDN. 0126038901



3. Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H
NIDN. 2025077801



4. Laylan Syafina, M.Si
NIDN. 2027089103

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 20232047602

ABSTRAK

Atikah Hasanah (2021), “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan)” dibawah bimbingan Hendra Harmain, SE., M.Pd sebagai Pembimbing Skripsi I dan Nurwani, M.Si sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner serta populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Kepegawaian Negara Regional VI Medan yang bertugas di bagian tata usaha dan bagian keuangan sebanyak 30 pegawai dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Data dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Hasil dari hipotesis uji parsial menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi tidak tergantung pada penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil dari hipotesis uji simultan menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan.

Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Badan kepegawaian negara Kantor Regional VI Medan”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Selama penyusunan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih khususnya yang Terspesial dan Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai Ayahanda Budi Dermawan dan mamak terhebat sedunia yaitu Ibunda Febrina yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dan bimbingan serta semangat yang tulus hingga saat ini serta dukungan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, M.A, selaku Wakil Dekan II Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H, selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M.A selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, juga selaku dosen Pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran- saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
8. Ibu Nurwani, M.Si selaku dosen Pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran- saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
9. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
10. Terimakasih kepada Siteeeekkk (Siti Chairani) Sahabat sedari kecil hingga saat ini, yang selalu memberikan dukungan dan doa yang luar biasa kepada penulis serta terimakasih karena telah bekerja sama dengan tidak rewel dan menyepam penulis melalui chat maupun telpon selama penulis mengerjakan bab akhir ini sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada pannurrrr (Fany Nur Hidayah Ningsih) Sahabat sedari tk hingga saat ini, teman nongkiws, teman melalak, yang sudah membantu dan menemani penulis membagikan kuesioner serta mendownloadkan aplikasi SPSS dan dan dukungan terbaiknya juga semangat serta doanya kepada penulis dalam pelaksanaan pengerjaan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Mithiiiiii (Aryumitha Luthfiah Siambaton), Harni (Harnisa) dan watiii (Krisnawati) Sahabat terbaik dan

seperjuangan skripsi di UINSU yang sangat luar biasa serta telah memberikan dukungan dan semangat serta doanya kepada penulis juga rela diganggu dan disibukkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terimakasih kepada seluruh teman teman Akuntansi Syariah E (AKS- E) Stambuk 2017 yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi.
14. Terimakasih kepada seluruh staf pegawai bagian tata usaha dan keuangan khususnya kepada buk Mira selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dan juga Pak Adit di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan yang sudah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan riset dan juga magang.
15. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
16. Semoga semua bantuan, bimbingan, arahan serta doa yang diberikan kepada penulis dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapat Ridho-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, akhir kata penulis ucapkan Terimakasih.

Medan, 30 Juli 2021

Penulis,

Atikah Hasanah

NIM. 0502173439

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
SURAT PERSETUJUAN	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Kejelasan Sasaran Anggaran.....	10
a. Pengertian Anggaran (<i>budget</i>).....	10
b. Sasaran Anggaran	10
c. Defenisi Kejelasan Sasaran Anggaran.....	11
d. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran.....	12
e. Kejelasan Sasaran Anggaran dalam Prespektif Islam ...	13
2. Pengendalian Akuntansi	14
a. Pengertian Pengendalian Akuntansi.....	14
b. Indikator Pengendalian Akuntansi	15
c. Pengendalian Akuntansi dalam Prespektif Islam	17
3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	18
a. Defenisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah....	18
b. Indikator Kinerja.....	19
c. Prinsip-prinsip Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	20

d. Tahapan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja	21
e. Akuntabilitas dalam Prespektif Islam	21
B. Kajian Terdahulu	22
C. Kerangka Teoritis	36
D. Hipotesa	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	38
C. Data Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel	40
E. Defenisi Operasional Variabel Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Negara	51
2. Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan	53
3. Deskripsi Data Penelitian	65
4. Analisis Statistik Deskriptif	70
5. Uji Kualitas Data	71
6. Uji Asumsi Klasik	75
7. Analisis Regresi Linear Berganda	78
8. Uji Hipotesis	80
B. Pembahasan	83
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	39
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	42
Tabel 4.1 Hasil Sampel dan Penyebaran Data	65
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden	66
Tabel 4.3 Usia Responden.....	66
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir.....	67
Tabel 4.5 Jabatan Responden.....	68
Tabel 4.6 Lama Bekerja.....	70
Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif.....	71
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) ..	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Akuntansi (X2)	72
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y).....	73
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	74
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengendalian Akuntansi (X2) ..	74
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y).....	74
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas	75
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas	76
Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	78
Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial (Uji T)	80

Tabel 4.18 Hasil Uji Simultan (Uji F).....82

Tabel 4.19 Hasil Uji Determinasi (R^2).....82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis.....	36
Gambar 4.1 Logo BKN Kantor Regional VI Medan	58
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatter Plot</i>	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas di pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konsep pemerintahan yang baik akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, maka nilai akuntabilitas sangatlah penting diadopsi dalam mengelola pemerintahan. Hal ini didasarkan pada argumen, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.¹

Sebuah pelaksanaan pemerintahan yang bersih menuntut seluruh pemerintah bekerja secara profesional dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas kepada publik. Yang membuat ketidakpuasan masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari pelayanan instansi pemerintah memicu timbulnya tuntutan yang tinggi terhadap pertanggungjawaban pemerintah. Tuntutan yang semakin tinggi

¹ Aminuddin Ilmar, *Kepemerintahan Yang Bertanggungjawab Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan* (Makassar: Phinatama Media, 2020), h. 7

tersebut diajukan kepada pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara yang diamanatkan kepada mereka.

Kinerja pemerintah menjadi sorotan publik karena masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah itu sendiri karena semakin banyaknya instansi pemerintah yang terlihat tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih baik. Kinerja pemerintah didasarkan pada kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan mengintegrasikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan.

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintah yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Dipihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja instansi pemerintah telah dilakukan setelah dikeluarkannya Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Instruksi ini menugaskan kepada para pemimpin instansi pemerintah untuk merumuskan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada masing-masing instansi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.²

Menguatnya kasus kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk mencapai sasaran dan tujuan sehingga dapat menciptakan *good governance*.

Instansi pemerintah yang sehat dapat mencerminkan kepentingan dan pengharapan kepada masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dengan efisien dan efektif. Anggaran merupakan suatu aspek terpenting dalam menyusun rencana dan misi secara sistematis pada periode yang sudah ditentukan. Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat negara. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran tersebut akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah dalam mencapai tujuan instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran tersebut dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan harus dipertanggungjawabkan oleh negara secara transparan.

Peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintahan terutama dalam akuntabilitasnya. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, menurut Mardiasmo (2006) anggaran merupakan dokumen antara pemerintah dan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang. Menurut

² Reyhan Hady Fauzan, "Pengaruh Kejelasan Saaran Anggaran, Pengemdalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntanbilas Terhadap Akuntanbilas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat", dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*. Vol. 4 No. 1, 2017, h. 1123

Kenis (1979) terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan anggaran. *Goal Setting Theory* menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang jelas dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja, semakin jelas sasaran anggarannya maka akuntabilitas kinerjanya akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Zakiyudin (2015), dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.³

Pengendalian akuntansi merupakan bagian dari suatu rencana yang teratur dengan baik untuk mencatat transaksi keuangan serta memastikan kendalanya, mengamankan dan mengendalikan aset negara. Adanya pengendalian akuntansi dapat memperkirakan masa depan atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari aktivitas organisasi. Sistem akuntansi yang baik dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Pada penelitian ini, penulis memilih Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan sebagai objek penelitian. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan salah satu kelembagaan yang didelegasikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas di bidang manajemen kepegawaian negara. Sebagai lembaga pemerintah Badan Kepegawaian Negara (BKN) wajib untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan misinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban dengan periode tertentu.

³ Devika Diah Precelina dan Eni Wuryani, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 7 No. 3. 2019, h. 1

Dalam penyelenggaraan kehidupan pemerintahan saat ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aset atau Sumber Daya Manusia (SDM) negara yang sangat penting dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan utusan pemerintah yang bertugas melayani kepentingan publik sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan yang profesional serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Fenomena yang terjadi dalam rangka memaksimalkan kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Biro Keuangan BKN mulai tahun anggaran 2015 mengimplementasikan Sistem Aplikasi Verifikasi Anggaran (SIAVA) pada unit kerja BKN Pusat dan Kantor Regional BKN. SIAVA adalah aplikasi untuk membantu dalam mengelola dokumen tagihan dan sebagai syarat dokumen tagihan atau standarisasi kelengkapan dan mendukung program penyerapan anggaran yang optimal.

Penerapan SIAVA bertujuan untuk mewujudkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan berbasis teknologi informasi. Sebelum pengimplementasian SIAVA penyerapan anggaran pada instansi pemerintah pada umumnya masih rendah seperti yang dikemukakan oleh Ibu Imas Sukmariah selaku Kepala Biro Keuangan BKN, adanya target pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi di lingkungan instansi pusat dan daerah, belum adanya standar dokumen keuangan antar BKN Pusat dan Kantor Regional, kompetensi SDM pengelola keuangan tentang peraturan di bidang keuangan dan teknis pengelolaan keuangan pada unit kerja masih terbatas, proses verifikasi masih berbasis manual, dilaksanakan setelah SPP diterbitkan oleh PPK dan tidak sesuai dengan peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi tata Kerja BKN, penerbitan Surat Permintaan

Membayar (SPM) terlambat/tidak sesuai dengan Peninjauan Masa Kerja (PMK) Nomor 190 Tahun 2012, serta terdapat temuan dari auditor internal (inspektorat) dan eksternal dalam pertanggungjawaban keuangan Negara, terlambatnya penyampaian laporan keuangan dari beberapa unit kerja untuk meningkatkan pelayanan prima di bidang keuangan. Dengan adanya implementasi aplikasi SIAVA diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi sejumlah permasalahan untuk meningkatkan kinerja BKN Pusat, Kantor Regional dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penghargaan pengelolaan keuangan terbaik dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan serta adanya transfer *knowledge* dalam pengelolaan keuangan pada instansi lainnya dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat Indonesia.⁴

Tidak mudah untuk mengembangkan sistem aplikasi tersebut, pada awal penerapan sistem aplikasi SIAVA masih mengalami kendala diakibatkan ada beberapa pegawai yang belum memahami sistem aplikasi tersebut karena kurang mampu dalam menguasai IT, sehingga pelaksanaannya belum mencapai pada tahap yang maksimal. Dengan berjalannya waktu penerapan sistem aplikasi SIAVA sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala namun bisa diatasi. Sistem Aplikasi SIAVA yang sudah berjalan dengan baik kembali mengalami kendala diakibatkan efek dari Pandemi C-19. Menurut Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Regional VI Medan, mengalami kendala dikarenakan sistem *Work Form Home* (WFH) diberlakukan. Adapun kendala yang dialami berupa jaringan kurang stabil sehingga mengalami hambatan dalam menyusun dan menginput data seperti pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP), pembuatan surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D), gaji, tunjangan kinerja, perjalanan dinas, uang lauk pauk, dan pada umumnya pegawai kurang maksimal untuk fokus

⁴ Bkn, *Biro Keuangan Implementasikan SIAVA dalam pengelolaan Keuangan BKN*, Tersedia: bkn.go.id, Diakses Pada Tanggal 13 November 2020

bekerja dikarenakan bekerja dari rumah, dimana kondisi rumah akan mempengaruhi kinerja pegawai. Selain itu juga ada beberapa kendala seperti terjadinya mutasi pada beberapa pegawai yang mengakibatkan kembali terjadinya proses belajar pada jabatan yang baru dijabatnya yang akhirnya berpengaruh terhadap kinerja pada sistem aplikasi SIAVA.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amiruddin Gani (2020) dengan judul Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran, pengendalian akuntansi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Karismawati Agustin (2018) dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Akuntansi dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian ini, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyerapan anggaran pada instansi pemerintah pada umumnya masih rendah. Adanya implementasi aplikasi SIAVA diharapkan mampu mendukung program penyerapan anggaran yang optimal.
2. Pengendalian akuntansi kurang terlaksana dengan baik, dengan pengimplementasian aplikasi SIAVA diharapkan mampu terlaksana dengan baik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejak diberlakukannya sistem WFH ditemukannya hambatan dalam penyusunan dan penginputan data karena jaringan yang kurang stabil, dan pada umumnya pegawai kurang maksimal untuk fokus bekerja dikarenakan bekerja dari rumah, dimana kondisi rumah akan mempengaruhi kinerja pegawai. Selain itu juga ada beberapa kendala seperti terjadinya mutasi pada beberapa pegawai yang mengakibatkan kembali terjadinya proses belajar pada jabatan yang baru dijabatnya yang akhirnya berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada sistem aplikasi SIAVA.

C. Batasan Masalah

Fokus pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan?

3. Apakah kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan secara simultan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan.
- b. Untuk mengetahui Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan.
- c. Untuk mengetahui kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan secara simultan.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian antara lain:

- a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai akuntabilitas kinerja.
- b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah pusat atau daerah agar dapat memahami pentingnya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Kejelasan Sasaran Anggaran

a. Pengertian Anggaran (*budget*)

Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas ke arah tujuan organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu.⁵

Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun oleh manajemen dalam jangka waktu tertentu untuk mengungkapkan penerimaan dan pengeluaran secara rinci dalam suatu proyek.

b. Sasaran Anggaran

Menurut Kenis kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang

⁵ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Erlangga, 2005), h. 163

yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.⁶ Pengelolaan keuangan pemerintah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya yang tepat agar tercapainya kinerja yang baik dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.⁷

Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat negara.

c. Defenisi Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suhartono dan Solihin, 2011). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun (Bastian, 2001), oleh karena itu kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang terutang secara kuantitatif (Sasongko, 2010). Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada tingkat dimana sasaran anggaran adalah dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dipahami oleh pihak yang bertanggungjawab untuk

⁶ Ehrman Suhartono dan Mochammad Solichin, "Pengaruh Kejelasan Saaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi." *Simposium Nasional Akuntansi 9*, (Padang, 2006), h. 9

⁷ Reyhan Hady Fauzan, "Pengaruh Kejelasan Saaran Anggaran, Pengemdalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat", dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, h. 1125

⁸ M. Ali Zakiyudin dan Suyanto, "Kejelasan Sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi, sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal kementerian Agama RI.", dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 2 No.1, 2015, h. 90

memenuhinya. Kejelasan sasaran anggaran diukur menggunakan 5 indikator yang diadopsi dari Indudewi (2009) yaitu: spesifik, terukur, menantang tapi realistis, berorientasi pada hasil akhir, memiliki batas waktu.⁹

d. Indikator Kejelasan sasaran Anggaran

Tujuan dan sasaran anggaran harus disesuaikan dengan lima indikator sebagai berikut :

1. Spesifik

Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.

2. Terukur

Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya. Meliputi: perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian.

3. Menantang tapi Realistis

Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai. Meliputi: luas daerah pemasaran yang ingin dicapai, *market share* yang ingin dimiliki.

4. Berorientasi pada hasil akhir

Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai bukan pada proses atau cara mencapainya. Meliputi: sasaran program yang telah ditetapkan dan evaluasi terhadap kesulitan sasaran yang dicapai.

5. Memiliki batas waktu

⁹ Afilu Hidayatullah dan Irine Herdjiono, "Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke", *Jurnal Akuntansi Seminar Nasional Multi Displin Ilmu Unisbank*, 2015, h. 5

Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai. Meliputi: program kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran anggaran yang dibuat dan program harus disertai target sasaran *output* dan *outcome*.

Dari indikator diatas dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran diharapkan dapat membantu manajer untuk mencapai program yang telah ditentukan dan tujuan perusahaan/instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam perencanaan anggaran yang juga akan mempengaruhi kinerja dapat meningkat.¹⁰

e. Kejelasan sasaran Anggaran Dalam Prespektif Islam

Adanya kejelasan sasaran anggaran dapat memudahkan aparat pemerintah dalam penyusunan target-target anggaran yang ingin dicapai instansi pemerintah sehingga dapat mendorong para pegawai atau aparat pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada instansi pemerintah. Dalam pandangan islam, kejelasan sasaran anggaran adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kita terhadap Allah SWT, karena segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi Allah SWT akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Dalam hal ini tujuan anggaran harus jelas dan spesifik agar dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab atas sasaran anggaran tersebut agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 36 :

¹⁰ Niswatul Khumaidah, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang", *Skripsi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018, h. 38-39

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu ikuti (campuri) hal yang kamu tidak ketahui (persoalannya). Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”¹¹

2. Pengendalian Akuntansi

a. Pengertian Pengendalian Akuntansi

Menurut Mulyadi, pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan. Pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi.¹²

Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktifitas organisasai, dimana pengendalian adalah proses yang dilakukan secara ekonomis, efisiensi dan efektif. Pengendalian akuntansi diukur menggunakan 6 indikator yang diadopsi dari Anthony (2000) yaitu: pemisahan fungsi, prosedur pemberian wewenang, prosedur dokumentasi, prosedur dan catatan akuntansi, pengawasan fisik, pemeriksaan intern secara bebas.¹³

¹¹ H. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, Q.S Al-Isra' (17) : 36, (Jakarta: Mutiara, 1983), h.

¹² Fauzan, “Pengaruh Kejelasan Saaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi”, h. 1126

¹³ Afilu Hidayatullah, “Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran, h. 5

Adanya pengendalian akuntansi dapat memperkirakan masa depan atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari aktivitas organisasi. Sistem akuntansi yang baik dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

b. Indikator Pengendalian Akuntansi

Untuk mencapai tujuan Pengendalian Akuntansi diukur menggunakan 6 indikator (Drs. Bambang Hartadi, 1990) yaitu:

1. Pemisahan Fungsi

Adanya pemisahan fungsi-fungsi akan dapat dicapainya suatu efisiensi pelaksanaan tugas. Disamping itu ditinjau dari sistem pengendalian adanya pemisahan fungsi, akan terdapat suatu cek silang (*cross check*) secara otomatis atas suatu pekerjaan atau pelaksanaan suatu transaksi. Tujuan utama pemisahan fungsi menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan.

2. Prosedur pemberian wewenang

Tujuannya untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang. Otorisasi dapat berupa otorisasi umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum menyangkut kondisi umum misalnya, adanya otorisasi terhadap daftar harga standar (yang dibakukan) dan kebijakan kredit untuk penjualan.

Otorisasi khusus berhubungan dengan transaksi perorangan, yaitu otorisasi penjualan khusus, penggajian atau transaksi pembelian. Bukti otorisasi khusus adalah adanya dokumentasi pada terjadinya transaksi.

3. Prosedur Dokumentasi

Dokumentasi yang layak adalah penting untuk terciptanya sistem Pengendalian Akuntansi yang efektif. Dokumentasi

memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

Dokumentasi dapat berbentuk dalam : faktur-faktur, voucher-voucher (Bukti perintah mengeluarkan uang), tanda tangan, initial/paraf, dan/cap persetujuan adanya atau pemberian angka cetak pada setiap jenis dokumen adalah membantu terciptanya pemeliharaan pengawasan transaksi.

4. Prosedur dan Catatan Akuntansi

Indikator ini menekankan pencatatan transaksi dalam bagian akuntansi. Tujuan pengendalian ini adalah, pertama dapat disisipkan atau dibuatnya catatan-catatan akuntansi yang teliti secara cepat, kedua data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu. Disini diperlukan adanya buku pegangan prosedur akuntansi dan bagan rekening (*chart of accounts*). Bagan rekening memberi dasar untuk mengadakan klasifikasi transaksi dan membantu penyiapan laporan keuangan.

5. Pengawasan fisik

Pengawasan fisik berhubungan dengan:

- 1) Alat keamanan dan ukuran untuk menyelamatkan aktiva, catatan akuntansi dan formulir tercetak yang gagal penggunaannya.
- 2) Penggunaan alat yang mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

Pengawasan fisik yang berhubungan dengan pelaksanaan transaksi meliputi baik *cash register* yang mekanis dan elektronis.

6. Pemeriksaan Intern Secara Bebas

Prinsip ini dirancang untuk menentukan apakah unsur-unsur yang lain dalam sistem bekerja atau tidak. Agar unsur ini efektif maka ada tiga syarat :

- 1) Pengawasan dilakukan oleh orang perusahaan yang bebas dan yang bertanggungjawab untuk data tersebut.
- 2) Pengawasan (*monitoring*) harus dilakukan pada saat atau waktu yang beralasan dan mendadak (tanpa pemberitahuan terlebih dahulu).
- 3) Penyimpangan harus dilaporkan kepada manajemen dan yang berhak mengambil tindakan perbaikan.¹⁴

c. Pengendalian Akuntansi dalam Prespektif Islam

Pengendalian akuntansi tidak hanya memeriksa kebenaran angka-angka dan melindungi harta kekayaan perusahaan dari segi pembukuan saja tetapi juga memperhatikan struktur organisasi perusahaan, meningkatkan efisiensi kerja dan menganalisis keberhasilan dan suatu kebijakan manajemen.¹⁵

Pengendalian akuntansi merupakan prosedur untuk melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dengan efisien agar tidak terjadinya penyimpangan yang tidak memuaskan. Maka dari itu dalam menyusun informasi dan pencatatan transaksi harus jujur dan tidak ada tindak kecurangan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

¹⁴ Niswatul Khumaidah, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran", h. 43-45

¹⁵ Muhammad Idul Launuru, "Perpektif Islam Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Harian Rakyat Maluku", *Journal of Islamic Economic and Buisness*, Vol. 02 No. 01, 2020, h. 2

Artinya :

“Celakalah orang-orang yang curang (1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima timbangan minta dipenuhi (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka memberi kurang (merugikan orang lain) (3).”¹⁶

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a. Defenisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2009).¹⁷ Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan untuk

¹⁶ Bakry, *Tafsir Rahmat*, Q.S Al-Mutaffifin (83) : 1-3 , h. 1219

¹⁷ Rusnanda Dian Kartika dan Sukamto, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian akuntansi dan sistem Pelaporan Terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Daerah Kota Surabaya)” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 01 No. 2, 2019, h. 68-69

mempertanggungjawabkan hasil kinerja para pegawai/aparat negara dalam pelaksanaan misi organisasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2009) pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diukur menggunakan 4 dimensi, yaitu akuntabilitas hukum, kebijakan, proses dan program.¹⁸

b. Indikator Kinerja

Indikator kinerja pemerintah terdapat beberapa jenis (Mahsun, 2006) yaitu:

1. Indikator Masukan (*Input*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Indikator Proses (*Process*)

Dalam indikator ini, organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik.

4. Indikator hasil (*Outcomes*)

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

5. Indikator manfaat (*Benefit*)

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator dampak (*Impact*)

Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.¹⁹

¹⁸ Afilu Hidayatullah, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran", h. 5

c. Prinsip-prinsip Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan laporan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Selain itu, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia menerbitkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang didalamnya memuat beberapa prinsip lagi yang juga harus diperhatikan, diantaranya:

- a) Prinsip Lingkungan Pertanggungjawaban
- b) Prinsip Prioritas
- c) Prinsip Manfaat

d. Tahapan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang kompleks dimana pelaksanaannya dianggap lebih rumit apabila dibandingkan dengan pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi sesungguhnya merupakan dampak positif atas terlaksananya akuntabilitas. Mengingat rumitnya pelaksanaan akuntabilitas maka di dalam pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memuat tahapan-tahapan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi²⁰ :

- a) Perencanaan Strategis
- b) Perencanaan Kinerja
- c) Pengukuran Kinerja
- d) Pelaporan Kinerja

¹⁹ Fitri Yani, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir", *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2017, h. 17-18

²⁰ Kartika dan Sukamto, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian akuntansi", h. 69

e) Evaluasi Kinerja

e. Akuntabilitas dalam Prespektif Islam

Menurut A Rahman (2003), bahwa dalam islam, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT atas apa yang telah dilakukan. Dalam pandangan Islam, akuntabilitas bisa dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada Allah SWT, karena segala sesuatu yang dititipkan Allah SWT kepada manusia merupakan amanah dan segala yang dikerjakan atau diperbuat manusia harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak²¹ Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan/melaksanakan amanah (pertanggungjawaban) terhadap orang-orang yang memberikan amanah itu. Dan apabila kamu menghukum antara manusia, lakukanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang amat baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*²²

²¹ Nahdliatul Amalia dan Tika Widiastuti, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada LAZ Surabaya)), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 9, 2019, h. 1758

²² Bakry, *Tafsir Rahmat*, Q.S. An-Nisa (04) : 58, h. 163

B. Kajian Terdahulu

Berikut kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Nama Variabel	Hasil Penelitian
1.	Amiruddin Gani (2020) ²³	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi Y: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2.	Amalia Ramadhani Ashari (2020) ²⁴	Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas	X1: Partisipasi Anggaran X2: Kejelasan Sasaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran secara parsial

²³ Amiruddin Gani, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu", Vol. 13 No.2, 2020

²⁴ Amalia Ramadhani Ashari, "Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu)", *Skripsi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako*, 2020

		Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu)	Anggaran Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah begitu juga dengan kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3.	Dewi Aprilianti, Mulyaning wulan, Herwin Kurniawan (2020) ²⁵	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Internal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh

²⁵ Dewi Aprilianti, Mulyaning wulan, Herwin Kurniawan, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9 No. 2, 2020

		<p>Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan</p>	<p>X3: Sistem Pelaporan Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan pengendalian internal dan sistem pelaporan secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>
--	--	--	--	---

4.	Yulia Cantika (2018) ²⁶	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar	X1: Perencanaan Anggaran X2: Kejelasan Sasaran Anggaran X3: Sistem Pelaporan X4; Sistem Pengendalian Internal Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji analitik menunjukkan

²⁶ Yulia Cantika, "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar", *Skripsi SI Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018

				<p>bahwa pengendalian internal merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tetapi pengendalian internal tidak mampu memoderasi hubungan perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>
5.	Karismawati Agustin	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,	X1: Kejelasan	Hasil penelitian menunjukkan

	(2018) ²⁷	Pengendalian akuntansi, sistem Pelaporan dan Ketatatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Yogyakarta)	Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi X3: Sistem Pelaporan X4: Ketaatan Peraturan Perundangan Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.
6.	Niswatul Khumaidah (2018) ²⁸	Kejelasan sasaran Anggaran dan Pengendalian	X1: Kejelasan Sasaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan

²⁷ Karismawati Agustin (2018), "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketatatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Yogyakarta), *Skripsi SI Universitas Islam Indonesia*, 2018

²⁸ Niswatul Khumaidah, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang", *Skripsi SI Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018

		<p>Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang</p>	<p>Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi Y: Akuntabilitas</p>	<p>sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik, Akuntabilitas secara positif dan signifikan memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja organisasi sektor publik, akuntabilitas secara positif dan signifikan memoderasi pengaruh pengendalian akuntansi terhadap kinerja</p>
--	--	---	---	--

				organisasi sektor publik.
7.	Reyhan Hady Fauzan (2017) ²⁹	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi X3: Sistem Pelaporan X4: Penerapan Akuntabilitas Keuangan Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
8.	Fitri Yani (2017) ³⁰	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran,	X1: Partisipasi Penyusunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara

²⁹ Reyhan Hady Fauzan, "Pengaruh Kejelasan Saaran Anggaran, Pengemdalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntanbilas Terhadap Akuntanbilas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat", dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*. Vol. 4 No. 1, 2017

³⁰ Fitri Yani, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir", *Skripsi SIFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2017

		Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir	Anggaran X2: Kejelasan Sasaran Anggaran Y: Kinerja	parsial partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja serta secara simultan partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja.
9.	Fita Andika Sari (2017) ³¹	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan

³¹ Fita Andika sari, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan)", *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 2017

		Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan)	Akuntansi X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sistem Pelaporan secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Penegndalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10.	Afilu Hidayatullah dan Irine Herdjiono (2015) ³²	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi X3: Sistem Pelaporan Y: Akuntabilitas	Hasil penelitian ini secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem

³² Afilu Hidayatullah dan Irine Herdjiono, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke", *Prosding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papaers Unis Bank (Sendi-u)*, 2015

			Kinerja Instansi Pemerintah	pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
11.	Eko Setiawan (2013) ³³	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi X3: Sistem Pelaporan Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sitem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

³³ Eko Setiawan, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2013

1. Persamaan dan perbedaan dari penelitian Amiruddin Gani (2020) dengan penelitian ini sebagai berikut :
 - a. Persamaannya yaitu sama-sama membahas variabel X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran) dan X2 (Pengendalian Akuntansi), Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga menggunakan metode kuantitatif.
 - b. Perbedaannya yaitu pada studi kasus serta populasi dan sampelnya.
2. Persamaan dan perbedaan dari penelitian Amalia Ramadhani Ashari (2020) :
 - a. Persamaannya yaitu sama-sama membahas variabel X (Kejelasan Sasaran Anggaran) dan Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta menggunakan metode kuantitatif.
 - b. Perbedaannya yaitu pada variabel X (Partisipasi Anggaran), populasi dan sampel serta studi kasusnya.
3. Persamaan dan perbedaan dari penelitian Dewi Aprilianti, Mulyaning wulan, Herwin Kurniawan (2020) dengan penelitian ini yaitu :
 - a. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta membahas variabel X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran) dan Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
 - b. Perbedaannya yaitu membahas 3 variabel X dan 2 diantaranya yang berbeda adalah X2 (Pengendalian Internal), X3 (Sistem Pelaporan serta studi kasus, populasi dan sampelnya juga berbeda
4. Persamaan dan perbedaan dari penelitian Yulia Cantika dengan penelitian ini yaitu :
 - a. Persamaannya yaitu sama-sama membahas variabel X2 (Kejelasan Sasaran Anggaran) dan variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta menggunakan metode kuantitatif juga sampel jenuh.

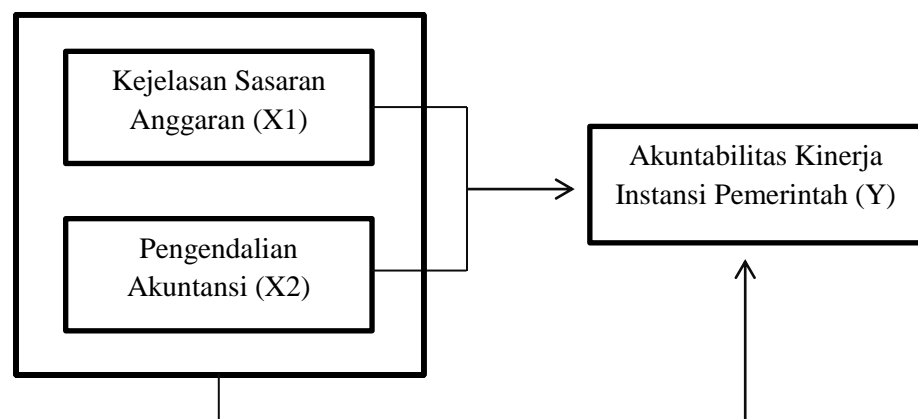
- b. Perbedaannya yaitu membahas 4 variabel X dan 3 diantaranya yang berbeda adalah X1 (Perencanaan Anggaran), X3 (Sistem Pelaporan), X4 (Sistem Pengendalian Internal) serta studi kasusnya.
5. Persamaan dan perbedaan dari penelitian Karismawati Agustin (2018) dengan penelitian ini yaitu :
 - a. Persamaannya yaitu sama-sama membahas variabel X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran) dan X2 (Pengendalian Akuntansi) serta menggunakan metode kuantitatif.
 - b. Perbedaannya yaitu membahas 4 variabel X dan 2 diantaranya yang berbeda adalah X3 (Sistem Pelaporan) X4 (Ketaatan Peraturan Perundangan) serta studi kasus yang berbeda.
6. Persamaan dan perbedaan dari penelitian Niswatul Khumaidah (2018) dengan penelitian ini yaitu:
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan membahas variabel X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran), X2 (Pengendalian Akuntansi)
 - b. Perbedaannya adalah studi kasus yang berbeda serta populasi dan sampelnya.
7. Persamaan dan perbedan dari penelitian Reyhan Hady Fauzan (2017) dengan penelitian ini yaitu :
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan membahas variabel X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran), X2 (Pengendalian Akuntansi), Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
 - b. Perbedaannya yaitu membahas 4 variabel X, dua diantaranya yang berbeda adalah X3 (Sistem Pelaporan) dan X4 (Penerapan Akuntabilitas Keuangan) serta studi kasus yang berbeda.
8. Persamaan dan perbedaan dari penelitian Firi Yani (2017) dengan penelitian ini yaitu :

- a. Persamaanya yaitu sama-sama membahas Kejelasan Sasaran Anggaran pada variabel X serta sama-sama menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan metode kuantitatif
 - b. Perbedaannya yaitu terletak pada populasi dan sampel serta pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan kuesioner, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan kuesioner saja.
9. Persamaan dan perbedaan dari penelitian Fita Andika Sari (2017) dengan penelitian ini yaitu :
- a. Persamaanya yaitu membahas X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran), X2 (Pengendalian Akuntansi), Y (Akuntabilitas Kinerja) serta menggunakan metode kuantitatif.
 - b. Perbedaannya yaitu terletak pada populasi dan sampel juga pada objek penelitian serta membahas 3 variabel X, satu diantaranya yang berbeda adalah X3 (Sistem Pelaporan)
10. Persamaan dan perbedaan dari penelitian Afilu Hidayatullah dan Irine Herdjiono (2015) dengan penelitian ini yaitu :
- c. Persamaanya yaitu sama-sama membahas X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran), X2 (Pengendalian Akuntansi), Y (Akuntabilitas Kinerja) serta menggunakan metode kuantitatif.
 - d. Perbedaannya yaitu terletak pada populasi dan sampel juga pada objek penelitian serta membahas 3 variabel X, satu diantaranya yang berbeda adalah X3 (Sistem Pelaporan)
11. Persamaan dan perbedaan dari penelitian Eko Setiawan (2013) dengan penelitian ini yaitu :
- a. Persamaanya yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan membahas variabel X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran), X2 (Pengendalian Akuntansi), Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

- b. Perbedaannya yaitu membahas 3 variabel X, satu diantaranya yang berbeda adalah X3 (Sistem Pelaporan) serta studi kasus, populasi dan sampelnya.

C. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis

Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para aparat atau pegawai negara. Dalam anggaran sangat perlu diketahui tentang kejelasan sasaran anggaran agar dapat memudahkan pegawai atau aparat pemerintah dalam penyusunan target-target anggaran yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Begitu juga dalam pencapaian kinerja manjerial yang baik perlu menggunakan sistem pengendalian akuntansi. Adanya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi diharapkan dapat mendorong para pegawai atau aparat pemerintah

untuk meningkatkan kinerja manajerial pada pengelolaan keuangan pemerintah sehingga terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi lebih baik.

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan adanya dugaan atau hubungan antara variabel x dan y yang akan diuji kebenarannya melalui data yang dikumpulkan dalam penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual dan kerangka teoritis yang telah diuraikan di atas pernyataan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- H_1 : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan.
- H_2 : Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan.
- H_3 : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Pendekatan asosiatif menurut Sugiyono adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.³⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik.³⁵

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Kepegawaian Negara Regional VI Medan. Peneliti memilih lokasi tersebut, karena dianggap mampu untuk mengidentifikasi bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah pada instansi pemerintah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan dari Februari 2021 sampai dengan Agustus 2021. Berikut tabel rincian pelaksanaan dalam penelitian ini :

³⁴ Pricilia Lampengan, James D. D. Massie, dan Ferdy Roring, "Pengaruh Motivasi, Kepercayaan dan Sikap Konsumen Terhadap Minat Beli Pengguna Online Shop Zalora Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat Manado.", *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 7 No. 4, 2019 h. 5696

³⁵ Asep Hermawan dan Husna Leila Yusran, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, (Depok: Kencana, 2017), h. 5-6

Tabel 3.1
Waktu penelitian

No.	Kegiatan	2021								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept
1.	Pengajuan Judul									
2.	Penyusunan Proposal									
3.	Bimbingan Proposal									
4.	Seminar Proposal									
5.	Pengambilan Data Penelitian									
6.	Pelaksanaan Penelitian									
7.	Penyusunan Penelitian									
9.	Sidang Akhir									

C. Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini adalah data primer, yaitu data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.³⁶

³⁶ Azuar Juliandi, Irfan, Saprinal Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi* (Medan, Umsu Press, 2014), h. 65

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini merupakan data primer yang di peroleh peneliti secara langsung dari jawaban atas kuisisioner yang dibagikan kepada responden.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam wilayah sebuah penelitian.³⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Kepegawaian Negara Regional VI Medan yang bertugas di bagian tata usaha dan bagian keuangan sebanyak 30 pegawai.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang unsur dan karakteristiknya dijadikan sebagai objek penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian dilakukan dengan metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh digunakan karena jumlah populasi relatif kecil sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian yang berjumlah 30 responden.

E. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Defenisi Operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca defenisi operasioanl dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut.³⁸

Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel, diantaranya:³⁹

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

³⁷ *Ibid* h. 51

³⁸ Dr. Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, 2015), h. 16

³⁹ Arfan Ikhsan, et. al., *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung : Cita Pustaka Media, 2014), h. 67

Variabel dependen (*dependent variables*) atau variabel terikat merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf *y*. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu, (Y) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen (*Independent variables*) disebut juga dengan variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf *x*. Yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini yaitu (X1) Kejelasan Sasaran Anggaran, (X2) Pengendalian Akuntansi.

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel Penelitian

No	Jenis Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1	Variabel Bebas (Kejelasan Sasaran Anggaran) X ₁	Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh yang bertanggungjawab atas pencapaian	1. Sasaran anggaran telah diketahui dengan jelas dan spesifik. 2. Jumlah anggaran yang disusun sama dengan jumlah anggaran yang direalisasikan. 3. Pelaksanaan	<i>Likert</i>

		sasaran anggaran tersebut.	anggran sudah sesuai SOP	
2	Variabel Bebas (Pengendalian Akuntansi) X_2	Pengendalian akuntansi merupakan prosedur dan dokumentasi untuk mencatat transaksi keuangan dengan akurat dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit, penetapan target anggaran, rencana jangka pendek dan jangka panjang digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan. 2. Evaluasi yang terjadwal tidak digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan 3. Transaksi dilakukan dengan adanya otoritas dari pihak yang berwenang 4. Setiap transaksi telah dicatat dalam 	<i>Likert</i>

			<p>buku akuntansi dan tetap “<i>up-to-date</i>”.</p> <p>5. Setiap transaksi didukung dengan bukti yang valid dan setiap laporan keuangan direview terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan.</p>	
3	Variabel Terikat (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Y	<p>Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.</p>	<p>1. kejelasan sasaran anggaran, visi, misi suatu program telah dipahami oleh semua pegawai dan pimpinan sesuai rencana strategik organisasi.</p> <p>2. Menetapkan dan mengontrol indikator kinerja,</p>	<i>Likert</i>

			<p>verifikasi dan melaporkan program yang berjalan pada setiap kegiatan serta melakukan analisis keuangan.</p> <p>3. Mengakomodir setiap perubahan dan menyusun LAKIP sebagai bahan pertimbangan dalam rencana kegiatan.</p> <p>4. Antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan memiliki keterkaitan satu sama lainnya.</p>	
--	--	--	---	--

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan

atau pertanyaan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subyek, secara individual atau kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu.⁴⁰ Kuesioner atau angket adalah serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan peneliti kepada para responden untuk mendapatkan jawaban secara tertulis.⁴¹

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner yang dilengkapi dengan petunjuk pengisian untuk membantu responden agar lebih mudah dalam melakukan pengisian kuesioner.

Kuesioner yang digunakan untuk setiap variabel dari penelitian yang dilakukan oleh Karismawati Agustin (2018). Kalimat pernyataan kuesioner pada variabel (X_1) dalam penelitian ini akan dimodifikasi oleh peneliti agar setiap unsur pernyataan lebih mudah dipahami oleh responden dan diharapkan dapat hasil yang lebih optimal dari penelitian terdahulu. Pernyataan kuesioner pada variabel (X_2 dan y) di adopsi dari Karismawati Agustin (2018).

Kuesioner merujuk pada variabel bebas (kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi) dan variabel terikat (akuntabilitas kinerja) yang diukur dengan model Skala Likert yaitu mengukur sikap dan pendapat seseorang atau kelompok untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap pertanyaan menggunakan skala sebagai berikut :

- a. 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- b. 2 = Tidak Setuju (TS)
- c. 3 = Setuju (S)
- d. 4 = Sangat Setuju (SS)

G. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan

⁴⁰ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 113

⁴¹ Asep Saepul Hamdi dan E. Bahrudin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 49

penelitian.⁴² Penelitian ini membahas dua buah variabel independen dan satu buah variabel dependen dengan menggunakan metode regresi berganda. Untuk memperoleh akurasi data penelitian, data dianalisis menggunakan alat statistik dengan bantuan program SPSS versi 20.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses pengumpulan dan penyajian data penelitian untuk memberikan informasi klasifikasi data sehingga hasilnya lebih mudah dipahami. Pada umumnya statistik deskriptif biasa digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas yaitu menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang diukur. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya.⁴³ Uji validitas dilakukan untuk menguji sejauh mana ketepatan suatu instrumen yang digunakan dengan cara menghitung korelasi antara skor butir pertanyaan dengan skor total. Pertanyaan dikatakan valid apabila $R_{hitung} > R_{tabel}$.

b. Uji Realibitas

Reabilitas yaitu menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Reabilitas berhubungan dengan akurasi (*accurately*) dari pengukurnya.⁴⁴ Suatu pertanyaan dikatakan reliabel jika jawaban atau hasil pertanyaan tersebut akurat dan konsisten. Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's*

⁴² Iman Supriyadi, *Metode Riset Akuntansi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 200

⁴³ Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman* (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2007), h. 120

⁴⁴ *Ibid* h. 120

Alpha dengan kriteria semakin besar nilai α ($>0,60$) maka data dinyatakan reliabel atau konsisten.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini untuk uji normalitas menggunakan *Kolmogrov-Smirnov*. Konsep dasar uji normalitas *Kolmogrov-Smirnov* adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk *Z-score* dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya, uji *Kolmogrov-Smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi data normal atau mendekati normal⁴⁵. Untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini dengan dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5% maka data terdistribusi secara normal.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5% maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel independen. Jika ada korelasi antar variabel independennya, maka koefisien regresi tidak bisa dipercaya. Multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas dari *Tolerance Value* $>$

⁴⁵ Ali Sahab, *Buku Ajar Analisis Kuantitatif Ilmu Politik Dengan SPSS*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 161

0,10 atau $VIF < 10$.⁴⁶ Jika nilai *Tolerance Value* $> 0,10$ atau $VIF < 10$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi varian tidak sama dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode grafik dengan melihat pola titik pada grafik regresi. Dasar kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁴⁷

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini rumus untuk menguji regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

X₁ = Kejelasan Sasaran Anggaran

⁴⁶ Natak Riswanto, Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dalam *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2016, h. 4

⁴⁷ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*, (Ponorogo: Cv. Wade Group, 2017), h. 129

X_2 = Pengendalian Akuntansi
 a = Konstanta
 b_1, b_2 = Koefisien regresi
 e = *error*

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut.⁴⁸ Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.⁴⁹

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat.⁵⁰

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai Sig. t $<$ $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai Sig. t $>$ $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji F)

⁴⁸ Laylan Syafina, *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*, (Medan: Febi Press), h. 35

⁴⁹ *Ibid* h. 36

⁵⁰ *Ibid* h. 39

Uji statistik F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah fix atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan.⁵¹

Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $Sig. F < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $Sig. F > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinan adalah diantara 0 dan 1. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.⁵²

⁵¹ *Ibid* h. 37

⁵² *Ibid* hal. 36

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Negara

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian Negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sekurang-kurangnya meliputi Perencanaan, Pengangkatan, Penempatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penggajian, Pembinaan, Kedudukan hak, Tanggung jawab. Kepegawaian Negara merupakan suatu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional. Badan Kepegawaian Negara merupakan sebuah instansi yang menghasilkan jasa *non profit* (tidak berorientasi pada perolehan laba), seperti perusahaan jasa pada umumnya yang bertujuan menghasilkan laba bagi perusahaan.

Setiap instansi/perusahaan tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan instansi/perusahaan tersebut, butuh waktu untuk mencapai itu semua, begitu juga pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan, instansi ini terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan oleh instansi dapat terwujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja.

Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja usaha terkini yang dijalankan instansi/perusahaan adalah menyelenggarakan beberapa program prioritas, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kinerja Pelayanan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan yakni:

1. Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
2. Pemberian pertimbangan, persetujuan, dan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat di wilayah kerjanya;
4. Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi daerah di wilayah kerjanya;
5. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya;
6. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
7. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
9. Kegiatan-kegiatan kerohanian juga tetap dilaksanakan, seperti perayaan hari-hari besar keagamaan (misalnya: Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Paskah, dan lain-lain) sehingga para pegawai selalu memiliki nilai-nilai dan norma-norma keagamaan dalam menjalani kehidupan, serta selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VI Medan

a. Sejarah Singkat

Perkembangan Kepegawaian Negara melalui beberapa tahap yaitu:

1. Masa sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia
2. Masa Revolusi Fisik
3. Masa Pemulihan Kedaulatan Republik Indonesia
4. Masa Kesatuan Republik Indonesia
5. Masa Reformasi

1) Masa sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada masa sebelum kemerdekaan RI Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang bekerja pada Pemerintah Hindia Belanda. Pembinaanya diselenggarakan oleh Kantuur Van Den Hoofd Ambtenar Voor Algemene Ambttenaarzeaken yang dibentuk pada tahun 1938.

2) Masa Revolusi Fisik

Pada masa revolusi fisik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang bekerja pada Pemerintahan Hindia Belanda. Pembinaanya oleh Kantuur Van Den Hoofd Ambtenar Voor Algemene Ambttenaarzeaken, dan selanjutnya diganti menjadi Dienst Voor Algemene Personale Zaken.

3) Masa Pemulihan Kedaulatan Republik Indonesia

Pada masa ini Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi :

a) Pegawai *Cooperatif*

Yang dimaksud dengan pegawai *cooperative* adalah Pegawai Negeri yang bekerja pada Pemerintahan Hindia Belanda dan digaji berdasarkan peraturan Pemerintah

Hindia Belanda sama seperti masa sebelum perang Kemerdekaan RI.

b) Pegawai *Non Cooperatif*

Yang dimaksud dengan pegawai *non cooperative* adalah pegawai yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia yang pada saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Pembinaanya diselenggarakan oleh Kantor Urusan Pegawai (berdasarkan PP. No. 11 Tahun 1948 tentang Peraturan Pembentukan Kantor Urusan Pegawai). Kantor ini merupakan cikal bakal dari kantor urusan pegawai yang selanjutnya menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

4) Masa Kesatuan Republik Indonesia

Pada masa kesatuan RI Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri yang bekerja pada Pemerintahan kesatuan Republik Indonesia. Pembinaanya diselenggarakan oleh Kantor Urusan Pegawai (KUP), yang merupakan penggabungan dari Kantor Urusan Pegawai di Yogyakarta dan jawatan Urusan Umum Pegawai di Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya maka pada tahun 1972 dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1972 KUHP diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BKAN).

Dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1972 maka kedudukan fungsi tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian semakin berkembang. Namun dalam perkembangannya PP No. 32 Tahun 1972 dirasakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1984 yang berisikan mencabut Peraturan Pemerintah No. 32

Tahun 1972, dan menyatakan kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pemerintah kemudian menyempurnakan lagi struktur organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan menetapkan Kepres No. 11 Tahun 1984 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Tugas Badan Administrasi Kepegawaian Negara menurut Kepres tersebut adalah membantu presiden dalam menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi Negara di bidang kepegawaian untuk menjamin jalannya pemerintahan.

Untuk mengantisipasi dan mengimbangi perkembangan keadaan agar jalannya penyelenggaraan administrasi kepegawaian dapat dilakukan lebih efektif, maka upaya penyempurnaan struktur organisasi Badan Administrasi Kepegawaian ini secara langsung telah berdampak terhadap budaya kerja cepat, tepat, dan selamat.

Adanya perubahan struktur organisasi dan budaya kerja ini telah mendorong Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk merancang satu rencana kerja yang lebih terarah dan terpadu baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengimbangi meningkatnya tugas dan badan kerja Badan Administrasi Kepegawaian Negara, maka di beberapa daerah dibentuk Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara, salah satunya adalah Kantor Wilayah VI Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Medan.

Kantor Regional VI Badan Kepegawai Negara Medan dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara No. 54 / KEP / 1997, dan diresmikan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada tanggal 18 Februari 1998. Badan Administrasi Kepegawaian Negara Kantor Regional VI diberikan tugas menyelesaikan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada di wilayah yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.

Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara adalah unit organisasi vertikal Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang berada di bawah tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara dan dipimpin langsung oleh seorang kepala.

4) Masa Reformasi

Dengan keputusan Presiden No. 95 Tahun 1999 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 59/KEP/1999 tentang organisasi tata kerja Badan Administrasi Kepegawaian Negara maka dipandang perlu untuk mengubah nama kantor wilayah dengan membentuk Kantor Regional Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan Keputusan tersebut maka nama Badan Administrasi Kepegawaian Negara di seluruh Indonesia diubah menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2000 di Jakarta dengan ketetapan Kepala Kepegawaian Negara.

Adapun yang menjadi Visi, Misi dan Moto adalah sebagai berikut :

a) Visi Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan

Mewujudkan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Sebagai Unit Terdepan Dalam Pelayanan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.

b) Misi Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan

Adapun misi dari BKN Kantor Regional VI Medan yaitu:

1. Menyelenggarakan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian
2. Menyelenggarakan Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi dan Pemeliharaan Data Kepegawaian PNS
3. Menyelenggarakan Pengawasan dan Pengendalian serta Bimbingan Teknis Bidang Kepegawaian
4. Menyelenggarakan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan, Pengelolaan Sumber Daya dan Administrasi serta Manajemen Internal.

c) Motto Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan

“KEPUASAN ANDA KEBANGGAAN KAMI.”



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL VI**

Gambar 4.1

**Logo Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional
VI Medan**

*Sumber : Kantor Regional VI Badan Kepegawaian
Negara Medan*

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi, serta menggambarkan juga dengan jelas tugas-tugas kerja masing-masing yang harus diselesaikan tepat waktu. Hal ini sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas yang dibebankan institusi atau perusahaan.

Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa dan siapa yang bertugas melaksanakan suatu pekerjaan pada sebuah pos kerja di dalam sebuah institusi atau perusahaan. Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan memiliki struktur organisasi berbentuk garis, dimana pimpinan bertindak sebagai pengelola puncak tanpa diatur atau dipengaruhi oleh orang lain pada posisinya yang menunjukkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam pembagian fungsi-fungsi operasional.

Struktur organisasi Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan telah mengalami banyak perubahan atau penyempurnaan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perusahaan.

c. Pembagian Kerja

a) Kepala

Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam menyelenggarakan administrasi dan manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah di wilayah kerjanya, melaksanakan koordinasi kerja sama dibidang kepegawaian dengan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, dan instansi pusat yang berada di daerah dalam wilayah kerjanya, serta memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b) Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan

organisasi Kantor Regional BKN. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program
2. Pengelolaan administrasi keuangan
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian
4. Pengelolaan tata usaha kantor, dokumentasi dan kehumasan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran serta pembukuan verifikasi.
2. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, administrasi mutasi dan pengembangan kepegawaian serta kesejahteraan pegawai.
3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, dokumentasi, kehumasan, penyusunan laporan, serta urusan perlengkapan, angkutan kendaraan dinas, urusan dalam dan keamanan.

c) Bagian Mutasi

Bidang mutasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan teknis mutasi kepegawaian kepada Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di daerah, dan

menetapkan kenaikan pangkat anumerta, pengabdian di wilayah kerjanya.

Bidang Mutasi terdiri dari :

1. Seksi Administrasi Mutasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan administrasi
2. Seksi Mutasi I, II, III mempunyai tugas melakukan penelitian persyaratan dan penyiapan bahan pertimbangan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat 1 gol. Ruang 1/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e dan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi juru Muda Tingkat 1 golongan ruang 1/b sampai dengan Pembina Tingkat 1 golongan ruang IV/b, serta penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan penyiapan pertimbangan teknis peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah.

d) Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun

Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu isteri/suami (KARIS/KARSU), pemberhentian dan pemberian pension bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan janda/dudanya dan penyiapan pertimbangan teknis bagi pegawai Negeri Sipil Daerah dan janda/dudanya yang telah mencapai batas usia pension, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian lainnya.

1. Seksi Administrasi Status Kepegawaian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan administrasi status kepegawaian dan pensiun.
2. Seksi Status Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan Nomor Identitas pegawai bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
3. Seksi Pensiun I dan Seksi Pensiun II mempunyai tugas melakukan penelitian dan penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat serta penyiapan bahan pertimbangan teknis pemberitahuan dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencapai batas usia pensiun serta pensiun janda/dudanya, dan pengelolaan tata naskah pensiun.

d) Bidang Informasi Kepegawaian

Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sistem informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian pada instansi daerah diwilayah kerjanya.

Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari :

1. Seksi Penyiapan dan Pengelolaan data Kepegawaian I dan II mempunyai tugas melakukan urusan pengagendaan, penyuntingan, penyandian, perekaman, pengelompokan, penyimpanan, dan pemeliharaan surat/ dokumen kepegawaian, serta penyiapan penyusunan laporan/perangkaan sesuai beban tugasnya.

2. Seksi Pengelolaan Data Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengolahan data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah, koordinasi dalam penyelenggaraan aplikasi informasi kepegawaian, pemeliharaan basis data kepegawaian serta penyimpanan data dalam komputer.
3. Seksi Penyajian dan Pertukaran Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan jaringan komunikasi data, rekonsiliasi data dan system informasi kepegawaian, serta penyajian dan pertukaran informasi kepegawaian.

e) Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian

Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis kepegawaian dan Diklat kepegawaian, melakukan pengawasan kompetensi jabatan, dan pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah.

Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian terdiri dari

:

1. Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian, pengawasan standar kompetensi jabatan, dan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian di wilayah kerjanya, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara.
2. Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian II mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis

kepegawaian, pengawasan standar kompetensi jabatan, dan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian di wilayah kerjanya.

3. Seksi Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kebutuhan Diklat, menyusun program Diklat, menyiapkan penyelenggaraan Diklat kepegawaian, melakukan kerja sama Diklat, monitoring, dan pengendalian pemanfaatan Diklat instansi di wilayah kerjanya.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun kelompok jabatan fungsional sebagai berikut :

1. Di lingkungan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara terdapat kelompok jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari analisis kepegawaian, pranata *computer* dari jabatan fungsional lainnya.
3. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara.
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini sampel dilakukan dengan metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh digunakan karena jumlah populasi relatif kecil sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian yang berjumlah 30 responden. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini berupa penyebaran kuesioner kepada responden yaitu pegawai pada bagian tata usaha dan bagian keuangan pada BKN Kantor Regional VI Medan. Karakteristik pada penelitian ini digambarkan melalui jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, dan lama menjabat. Berikut tabel-tabel hasil ringkasan sampel dan penyebaran data kuesioner serta karakteristik responden pada penelitian ini :

Tabel 4.1
Hasil Sampel dan Penyebaran Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dibagikan	30	100%
Kuesioner yang kembali	30	100%
Kuesioner yang dapat diolah	30	100%
Sampel akhir yang diteliti	30	100%

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa sampel yang direncanakan dengan kuesioner yang dibagikan sama jumlahnya yaitu sebanyak 30 kuesioner. Jumlah kuesioner yang dikembalikan adalah 30 kuesioner. Dari jumlah kuesioner yang dikembalikan oleh responden semuanya dapat diolah sebanyak 30 kuesioner dengan tingkat persentase yaitu 100% dan menjadi sampel akhir pada penelitian ini.

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Pria	15	50%
2.	Wanita	15	50%

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan karakteristik jenis kelamin responden. Responden dengan jenis kelamin pria berjumlah 15 dengan persentase pria begitu juga dengan jumlah responden yang berjenis kelamin wanita sama yaitu 15 dengan persentase 50%. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tidak hanya pekerja/pegawai pria sebagai tulang punggung keluarga tetapi wanita juga. Pekerja/pegawai pria dan wanita sama-sama mendominasi dalam meningkatkan kinerja dan ekonomi pemerintahan indonesia.

Tabel 4.3
Usia Responden

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	<25 Tahun	0	0%
2.	25-35 Tahun	12	40%
3.	36-50 Tahun	17	57%
4.	>50 Tahun	1	3%

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, terlihat bahwa dari 30 responden usia terbanyak ada pada tingkat usia 36-50 tahun dengan jumlah 17 orang dengan persentase 57%, kemudian jumlah responden pada tingkat usia 25-35 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase

40%, sedangkan pada tingkat usia >50 tahun berjumlah 1 responden. Dari tabel tingkat usia responden menunjukkan bahwa usia rata-rata pegawai masih tergolong muda dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah tepatnya pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan.

Tabel 4.4
Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	SMA	0	0%
2.	D3	14	47%
3.	S1	12	40%
4.	S2	4	13%
5.	S3	0	0%
6.	Lainnya	0	0%

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Dari tabel 4.4 diatas, menunjukkan informasi latar belakang pendidikan terakhir dari responden yaitu pada tingkat pendidikan D3 berjumlah 14 responden dengan perentase sebanyak 47% kemudian pada pendidikan S1 terdapat 12 responden dengan persentase 40% dan yang terakhir latar belakang pendidikan S2 yaitu sebanyak 4 responden dengan tingkat persentase 13%

Tabel 4.5
Jabatan Responden

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Kepala Bagian Tata Usaha	1	3%
2.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	3%
3.	Analisis Kepegawaian Pertama	2	7%
4.	Arsiparis Mahir	1	3%
5.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	3%
6.	Analisis Keuangan	3	10%
7.	Kasubbag Kepegawaian	1	3%
8.	Pengolah Data Kepegawaian	1	3%
9.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	1	3%
10.	Perawat Pelaksana Lanjutan	1	3%
11.	Perawat Pelaksana	1	3%
12.	Analisis Kinerja	2	7%
13.	Analisis Hukum	1	3%
14.	Kasubbag Umum	1	3%
15.	Teknisi Peralatan Listrik dan Elektronika	1	3%
16.	Arsiparis Ahli Muda	1	3%
17.	Analisis Pengelola Barang Milik Negara	1	3%

	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
18.	Pertama	1	3%
19.	Pengelola Kendaraan	1	3%
20.	Sekretaris	1	3%
21.	Pranata Humas Ahli Pertama	1	3%
22.	Pengolah Data Kepegawaian	1	3%
23.	Petugas Protokol	1	3%
24.	Assesor SDM Aparatur Pertama	3	10%

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, terdapat 24 jenis divisi yang dijabat oleh 30 responden yang mana kepala bagian divisi masing-masing berjumlah 1 responden dengan persentase 3%, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, dan Kasubbag Kepegawaian. Kemudian pada jabatan lainnya seperti Analisi Kepegawaian Pertama, Arsiparis Mahir, Pranata Keuangan APBN Mahir, Pengolah Data Kepegawaian, Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan, Perawat Pelaksana Lanjutan, Perawat Pelaksana, Analis Hukum, Teknisis Peralatan Listrik dan Elektronika, Arsiparis Ahli Muda, Analis Pengelola Barang Milik Negara, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Pengelola Kendaraan, Sekretaris, Pranata Humas Ahli Pertama, Pengolah Data Kepegawaian, Petugas Protokol, dari bagian-bagian jabatan tersebut terdapat masing-masing 1 responden dengan persentase 3%. Selanjutnya terdapat 2 responden yang menjabat sebagai Analis Kepegawaian Pertama dengan persentase 7%, 3 responden yang menjabat sebagai Analis Keunagan dengan persentase 10%, dan 3 responden dengan persentase 10% menjabat sebagai Assesor SDM Aparatur Pertama.

Tabel 4.6
Lama Bekerja

No.	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1.	>5 Tahun	16	53%
2.	5-10 Tahun	5	17%
3.	10-15 Tahun	9	30%
4.	>15 Tahun	0	0%

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Pada tabel 4.6 diatas, terdapat informasi mengenai berapa lama bekerja responden. Jumlah terbanyak responden yang lama bekerja ada pada kisaran >5 tahun bekerja dengan persentase 53% dan total 16 responden. Kemudian pada kisaran 5-10 tahu terdapat 5 rsponden dengan persentase 17%, diikuti dengan 9 responden pada persentase 30% yang lama bekerja dikisaran 10-15 tahun bekerja.

4. Analisis Statistik Deskriptif

Pada analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik variabel pada penelitian. Adapun bagian dari analsisi statistik deskriptif yaitu, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, niali maksimum dan nilai minimum.

Tabel 4.7
Hasil Statistik Deskriptif

N		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran	30	24	27	26.37	.964
Pengendalian Akuntansi	30	29	35	32.23	1.331
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	30	35	39	37.53	1.224
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Pada table 4.7 diatas, menunjukkan pada penelitian ini terdapat 3 variabel dengan jumlah sampel sebanyak 30. Pada Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) memiliki nilai rata-rata 26,37 dengan penyebaran rata-rata atau simpangan baku sebesar 0,964. Variable Pengendalian Akuntansi (X2) memiliki nilai simpangan baku sebesar 1,331 dengan nilai rata-rata 32,23. Nilai rata-rata Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) yaitu 37,53 dengan nilai simpangan baku sebesar 1,224.

5. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Untuk mengukur valid atau tidak data yang diolah maka dilakukan pengujian validitas data dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel setiap butir pertanyaan pada masing-masing variable. Apabila nilai r hitung $>$ r tabel (dengan signifikansi 0,05) maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Untuk mengukur nilai r tabel pada penelitian ini dengan $N = 30$ dengan taraf signifikansi 5%.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran
(X1)

No Item	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,657	0,361	0,000	Valid
2	0,617	0,361	0,000	Valid
3	0,652	0,361	0,000	Valid
4	0,596	0,361	0,000	Valid
5	0,690	0,361	0,000	Valid
6	0,605	0,361	0,000	Valid
7	0,602	0,361	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS.v.26

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Akuntansi (X2)

No Item	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1.	0,754	0,361	0,000	Valid
2.	0,544	0,361	0,002	Valid
3.	0,524	0,361	0,003	Valid
4.	0,469	0,361	0,009	Valid
5.	0,535	0,361	0,002	Valid
6.	0,545	0,361	0,002	Valid
7.	0,513	0,361	0,004	Valid
8.	0,447	0,361	0,013	Valid

9.	0,420	0,361	0,021	Valid
----	-------	-------	-------	-------

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Y)

No Item	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig.5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1.	0,664	0,361	0,000	Valid
2.	0,699	0,361	0,000	Valid
3.	0,479	0,361	0,007	Valid
4.	0,413	0,361	0,023	Valid
5.	0,633	0,361	0,000	Valid
6.	0,515	0,361	0,004	Valid
7.	0,593	0,361	0,001	Valid
8.	0,506	0,361	0,004	Valid
9.	0,422	0,361	0,020	Valid
10.	0,542	0,361	0,002	Valid

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Berdasarkan tabel 4.8, tabel 4.9, dan tabel 4.10, menunjukkan bahwa hasil analisis dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), variabel Pengendalian Akuntansi (X2), dan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) memiliki nilai r-hitung yang diperoleh dari perhitungan statistik lebih besar dari nilai r-tabel. Hasil ini menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan pada setiap variabel dapat dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Suatu pertanyaan dikatakan reliabel jika jawaban atau hasil pertanyaan tersebut akurat dan konsisten dari waktu ke waktu.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator dari variabel dalam penelitian ini. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* dengan kriteria semakin besar nilai alpha ($>0,60$) maka data dinyatakan reliabel atau konsisten.

Tabel 4.11

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.738	7

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Tabel 4.12

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengendalian Akuntansi (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.682	9

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Tabel 4.13

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.739	10

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Berdasarkan tabel 4.11, tabel 4.12, dan tabel 4.13 diatas, menunjukkan bahwa hasil uji dari setiap variabel dinyatakan reliabel. Hasil uji teknik *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel menghasilkan nilai lebih besar dari kriteria nilai alpha

(>0,60), maka dapat disimpulkan data atau butir-butir pertanyaan dari setiap variabel dalam penelitian ini dinyatakan konsisten dan reliabel.

6. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini untuk uji normalitas menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* dengan alat bantu uji aplikasi SPSS v. 26. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel residual atau pengganggu dapat terdistribusi normal atau tidak pada model regresi. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal dengan melihat signifikansi $> 0,05$ atau 5% maka data terdistribusi normal.

Tabel 4.14
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.02906049
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.090
	Negative	-.137
Test Statistic		.137
Asymp. Sig. (2-tailed)		.154 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Dari tabel 4.14 diatas, menunjukkan hasil tes uji normalitas menggunakan teknik *Kolmogrov-Smirnov*. Dari hasil diatas, terlihat nilai signifikansi $0,154 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kesimpulan dari hasil diatas yaitu seluruh data pada penelitian ini sudah terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah adanya korelasi antar variabel independen. Cara melihat ada atau tidaknya korelasi antar variabel indepen yaitu, jika nilai *Tolerance Value* $> 0,10$ atau *VIF* < 10 maka dapat dinyatakan tidak terdapat korelasi antar variabel independennya.

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				Collinearity Statistics	
Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	19.908	6.872		2.897	.007		
X1	.640	.180	.567	3.562	.001	.987	1.013
X2	.024	.175	.021	.135	.894	.987	1.013

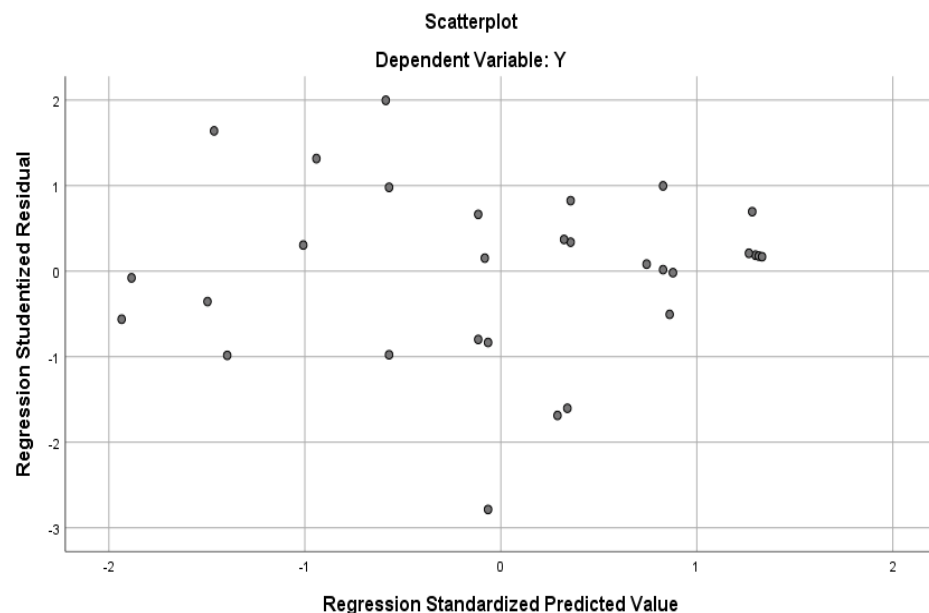
a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, menunjukkan hasil uji multikolinearitas. Terlihat dari hasil uji tersebut nilai VIF dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan variabel Pengendalian Akuntansi (X2) sama yaitu $1,013 > 0,10$. Untuk nilai *Tolerance* pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan variabel Pengendalian Akuntansi (X2) juga sama yaitu $0,987 < 10$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan tidak ditemukan adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat titik-titik pada *scatter plot* menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2

Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatter Plot*

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Dari gambar 4.1 diatas, dapat dilihat hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menunjukkan titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan terlihat tidak ada pola yang jelas membentuk suatu pola tertentu. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terrjadinya heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

7. Analisis Regresi Linear Berganda

Adapun uji regresi linear berganda ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen sesuai dengan hipotesis yang diajukan pada bab sebelumnya.

Tabel 4.16

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				Collinearity Statistics	
Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	19.908	6.872		2.897	.007		
X1	.640	.180	.567	3.562	.001	.987	1.013
X2	.024	.175	.021	.135	.894	.987	1.013

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dalam penelitian ini rumus untuk menguji regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 19,908 + 0,640X_1 + 0.024 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

X₁ = Kejelasan Sasaran Anggaran

X₂ = Pengendalian Akuntansi

A = Konstanta

b₁, b₂ = Koefisien regresi

e = Faktor gangguan

Berdasarkan rumus regresi linear berganda diatas dapat diambil kesimpulan yang dijelaskan dibawah ini :

- a. Besar nilai konstanta 19,908 dan bernilai positif. Hal ini menyatakan apabila variabel independen dianggap konstan. Dapat disimpulkan bahwa koefisien dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁) dan Pengendalian Akuntansi (X₂) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).
- b. Nilai koefisien regresi pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁) sebesar 0,640 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dengan Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁).
- c. Koefisien regresi pada variabel Pengendalian Akuntansi (X₂) bernilai 0,024 dan sangat rendah. Artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Y) dengan variabel Pengendalian Akuntansi (X₂).

8. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) secara individual atau parsial terhadap variabel terikat (dependen). Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan nilai $\text{sig. } T < \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau individual variabel bebas (independen) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nilai $t\text{-tabel} = (a/2 ; n-k-1)$ hasilnya $0,05/2 = 0,025$ (uji dua sisi) dan $30-3-1 = 26$, dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas. Maka hasil yang diperoleh untuk $t\text{-tabel}$ dengan signifikansi uji dua sisi (0,025) dan derajat kebebasan ($df=n-k-1$) adalah 2,055.

Tabel 4.17

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a							
Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				Collinearity Statistics	
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	19.908	6.872		2.897	.007		
X1	.640	.180	.567	3.562	.001	.987	1.013
X2	.024	.175	.021	.135	.894	.987	1.013

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, menunjukkan hasil uji t (uji parsial) yang dijelaskan dibawah ini :

- a. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dengan nilai t-hitung $3,562 >$ nilai t-tabel $2,055$ dan nilai sig.t $0,01 < \alpha = 0,05$. Artinya variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), hal ini membuktikan bahwa keputusan H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak.
- b. Variabel Pengendalian Akuntansi dengan nilai t-hitung $0,135 <$ nilai t-tabel $2,055$ dengan nilai sig.t $0,894 > \alpha = 0,05$. Artinya variabel Pengendalian Akuntansi (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), sehingga membuktikan bahwa keputusan H_{a2} ditolak dan H_{o2} diterima.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel bebas dalam model regresi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Untuk membuktikannya dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Cara menentukan F-tabel yaitu $df (N1) = k-1$ atau $3-1 = 2$ dan $df (N2) = n-k$ atau $30-3 = 27$, sehingga diperoleh nilai F-tabel sebesar $3,35$. Jika nilai F-hitung $>$ F-tabel dan nilai Sig. $F < \alpha = 0,05$ maka secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.18
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	57.404	2	28.702	6.491	.005 ^b
Residual	119.396	27	4.422		
Total	176.800	29			
a. Dependent Variable: Y					
b. Predictors: (Constant), X2, X1					

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, menunjukkan hasil F-hitung 6,491 > F-tabel 3,35 adan diperoleh nilai signifikansi F (0,005) < $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan variabel Pengendalian Akuntansi (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), sehingga membuktikan bahwa keputusan H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak .

d. Koefisien Determinan (R^2)

Uji determinan dilakukan menemukan besarnya tingkat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinan berada diantara 0 dan 1. Nilai determinan yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat sangat terbatas.

Tabel 4.19
Hasil Uji Determinan (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.570 ^a	.325	.275	2.10287

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS.v.26, 2021

Berdasarkan hasil tabel 4.16 diatas, menunjukkan bahwa nilai *R Square* 0.325. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan Pengendalian Akuntansi (X2) mampu menerangkan atau menjelaskan variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 32,5% sisanya 67,5% dijelaskan oleh variabel di luar model regresi.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesa pertama pada penelitian ini adalah Kejelasan sasaran Anggaran berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengujian hipotesis pada uji t yang dilakukan menunjukkan nilai signifikan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu $0,01 < a = 0,05$. Dan nilai koefisien regresi pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 0,640 dan bernilai positif. Nilai koefisien regresi menunjukkan hubungan yang positif dan searah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran. Maka kesimpulan H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian negara kantor Regional VI Medan sudah dijalankan dengan baik dan searah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena untuk meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintahan perlu adanya

Kejelasan Sasaran Anggaran agar dapat mencapai tujuan-tujuan pelaksanaan tugas dari organisasi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia Cantika (2018), Karismawati Agustin (2018), Reyhan Hadi Fauzan (2017), dan Eko Setiawan (2013). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesa ke 2 yang diajukan dalam penelitian ini ialah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pada variabel Pengendalian Akuntansi sebesar 0,024 dan sangat rendah. Pada uji t diatas, terlihat nilai t-hitung (0,135) < nilai t-tabel (2,055) dengan nilai sig.t 0,894 > $\alpha = 0,05$. Artinya variabel Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maka kesimpulan H_{a2} ditolak dan H_{o2} diterima.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan tidak tergantung pada penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menandakan bahwa belum tercapai dengan maksimal dalam pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan. Semakin baik dan maksimal pencapaian Pengendalian Akuntansi semakin baik pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fita Andika Sari (2017) dimana hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesa ke 3 dari penelitian ini adalah Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil hipotesis pada uji simultan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil perbandingan F-hitung ($6,491$) $>$ F-Tabel $3,35$ dengan nilai signifikansi F ($0,005$), $\alpha = 0,05$. Dan besarnya nilai konstanta yaitu 19.908 dan bernilai positif. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maka kesimpulan H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi memiliki pengaruh yang penting untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya tujuan anggaran yang jelas dan Pengendalian Akuntansi yang baik dapat meningkatkan kinerja pada akuntabilitas untuk memudahkan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi pemerintahan.

Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Reyhan Hady Fauzan (2017), Fitri Yani (2017) dan Afilu Hidayatullah, Irine Herdjono (2015) yaitu Kejelasan sasaran Anggaran dan Pengendalian

Akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan, maka dapat diambil diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan.
2. Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan pada penelitian ini adanya beberapa keterbatasan, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Badan Kepegawaian Negara khususnya Badan Kepegawai Negara Kantor Regional VI Medan diharapkan agar selalu berupaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan melakukan peningkatan dan memaksimalkan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi.
2. Bagi para Pegawai Badan Kepegawaian Negara diharapkan agar selalu berupaya lebih memperhatikan Pengendalian Akuntansi dengan pengawasan yang teliti dan meningkatkan sistem pelaporan keuangan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan sebaiknya menambahkan variabel penelitian diluar dari variabel yang telah diteliti agar dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini serta menambahkan referensi lebih banyak lagi dan memperluas objek penelitian seperti pada sektor pemerintahan yang lainnya dan sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, K. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta.”, *Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia*, 2018
- Amalia, N., & Widiastuti, T., “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada LAZ Surabaya)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 9, 2019
- Aprilianti, D., wulan. M., & Kurniawan. H., “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan.”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 9 No. 2, 2020
- Bakry, H. O. *Tafsir Rahmat*, Jakarta: Mutiara, 1983
- Bastian, I. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Erlangga, 2005
- Bkn, *Biro Keuangan Implementasikan SIAVA dalam pengelolaan Keuangan BKN*, Tersedia: bkn.go.id, Diakses Pada Tanggal 13 November 2020
- Cantika, Y. “Pengaruh Perencanaan anggaran, kejelasan Sasaran anggaran, sistem Pelaporan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.”, *Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Alaudiin Makassar*, 2018
- Fauzan, R. H. “Pengaruh Kejelasan Saaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol. 4 No. 1, 1123-1126, 2017
- Hamdi, A.S., & Bahrudin, E. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014

- Hermawan, A., & Yusran, H. L. *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Depok: Kencana, 2017
- Hidayatullah, A., & Herdjiono I., “Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke”, *Jurnal Akuntansi Seminar Nasional Multi Displin Ilmu Unisbank*, 2015
- Idul, M. L., “Perpektif Islam Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Harian Rakyat Maluku”, *Journal of Islamic Economic and Buisness*, Vol. 02 No. 01, 2020
- Ikhasan, A., *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014
- Ilmar, A. *Kepemerintahan Yang Bertanggungjawab Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan*. Makassar: Phinatama Media, 2020
- Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2007
- Juliandi, A., Irfan., & Manurung, S. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan, Umsu Press, 2014
- Kartika, R. D., & Sukamto. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Daerah Kota Surabaya).” *Jurnal Akuntansi*. Vol. 01 No. 2, 68-69, 2019
- Khumaidah, N., “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang”, *Skripsi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018
- Lampengan, P., D, Massie., & Roring, F., “Pengaruh Motivasi, Kepercayaan dan Sikap Konsumen Terhadap Minat Beli Pengguna Online Shop Zalora Pada

- Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat Manado.” *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 7 No. 4, 2019
- Precelina, D. D., & Wuryani, E. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang”, *Jurnal Faculty of Economic Surabaya University, Surabaya, Indonesia*, Vol. 7 No. 3. 1, 2019
- Purnomo, R. A. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Ponorogo: Cv. Wade Group, 2017
- Riswanto, N. “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.”, *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2016
- Sahab, A., *Buku Ajar Analisis Kuantitatif Ilmu Politik dengan SPSS*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019
- Sari, F. A, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan)”, *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 2017
- Setiawan, E. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.” *Jurnal Faculty of Economic Riau University*. 2013
- Siyoto, S., & Sodik, A. M., *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Supriyadi, I. *Metode Riset Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Syafina, L. *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*. Medan: Febi Press, 2018
- Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012
- Yani, F., “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir”, *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2017

Zakiyudin, M. A., & Suyanto., “Kejelasan Sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi, sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal kementerian Agama RI”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakn*. Vol. 2 No.1, 90, 2015

LAMPIRAN I
Hasil Olah Data SPSS V.26

A. Uji Validitas

1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

		Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Total.X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.533**	.213	.363*	.250	.098	.463**	.657**
	Sig. (2-tailed)		.002	.258	.049	.183	.607	.010	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.533**	1	.489**	.077	.533**	.146	.099	.617**
	Sig. (2-tailed)	.002		.006	.685	.002	.441	.604	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.213	.489**	1	.077	.533**	.302	.428*	.652**
	Sig. (2-tailed)	.258	.006		.685	.002	.104	.018	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	.363*	.077	.077	1	.254	.355	.224	.596**
	Sig. (2-tailed)	.049	.685	.685		.176	.054	.234	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	.250	.533**	.533**	.254	1	.391*	.154	.690**
	Sig. (2-tailed)	.183	.002	.002	.176		.032	.416	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	.098	.146	.302	.355	.391*	1	.347	.605**
	Sig. (2-tailed)	.607	.441	.104	.054	.032		.060	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.7	Pearson Correlation	.463**	.099	.428*	.224	.154	.347	1	.602**
	Sig. (2-tailed)	.010	.604	.018	.234	.416	.060		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Total.X1	Pearson Correlation	.657**	.617**	.652**	.596**	.690**	.605**	.602**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Variabel Pengendalian Akuntansi (X2)

		Correlations									Total.X2
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	Total.X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.250	.433*	.535**	.386*	.408*	.250	.068	.183	.754**
	Sig. (2-tailed)		.183	.017	.002	.035	.025	.183	.721	.334	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.250	1	.000	-.089	.059	.544**	.167	.272	.365*	.544**
	Sig. (2-tailed)	.183		1.000	.640	.755	.002	.379	.146	.047	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	.433*	.000	1	.309	.154	.141	.289	.177	-.063	.524**
	Sig. (2-tailed)	.017	1.000		.097	.416	.456	.122	.350	.740	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	.535**	-.089	.309	1	.206	-.073	.208	.036	.098	.469**
	Sig. (2-tailed)	.002	.640	.097		.274	.702	.270	.849	.608	.009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	.386*	.059	.154	.206	1	.073	.356	.218	.098	.535**
	Sig. (2-tailed)	.035	.755	.416	.274		.702	.053	.247	.608	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.6	Pearson Correlation	.408*	.544**	.141	-.073	.073	1	.000	.167	.268	.545**
	Sig. (2-tailed)	.025	.002	.456	.702	.702		1.000	.379	.152	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.7	Pearson Correlation	.250	.167	.289	.208	.356	.000	1	.102	.000	.513**
	Sig. (2-tailed)	.183	.379	.122	.270	.053	1.000		.591	1.000	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.8	Pearson Correlation	.068	.272	.177	.036	.218	.167	.102	1	.224	.447*
	Sig. (2-tailed)	.721	.146	.350	.849	.247	.379	.591		.235	.013
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.9	Pearson Correlation	.183	.365*	-.063	.098	.098	.268	.000	.224	1	.420*
	Sig. (2-tailed)	.334	.047	.740	.608	.608	.152	1.000	.235		.021
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total.X2	Pearson Correlation	.754**	.544**	.524**	.469**	.535**	.545**	.513**	.447*	.420*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.003	.009	.002	.002	.004	.013	.021	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

		Correlations										
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Total.Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.853**	.135	.066	.318	.099	.167	.737**	.010	.264	.664**
	Sig. (2-tailed)		.000	.477	.730	.087	.604	.378	.000	.956	.159	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.2	Pearson Correlation	.853**	1	.063	.000	.373*	.154	.196	.613**	.196	.354	.699**
	Sig. (2-tailed)	.000		.740	1.000	.042	.416	.300	.000	.300	.055	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.3	Pearson Correlation	.135	.063	1	.293	.135	.293	.217	-.035	.402*	.224	.479**
	Sig. (2-tailed)	.477	.740		.116	.477	.116	.250	.853	.028	.235	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.4	Pearson Correlation	.066	.000	.293	1	.230	.111	.196	.017	.196	.145	.413*
	Sig. (2-tailed)	.730	1.000	.116		.221	.559	.299	.928	.299	.443	.023
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.5	Pearson Correlation	.318	.373*	.135	.230	1	.428*	.636**	.202	.010	.075	.633**
	Sig. (2-tailed)	.087	.042	.477	.221		.018	.000	.284	.956	.692	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.6	Pearson Correlation	.099	.154	.293	.111	.428*	1	.408*	-.017	.106	.218	.515**
	Sig. (2-tailed)	.604	.416	.116	.559	.018		.025	.928	.578	.247	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.7	Pearson Correlation	.167	.196	.217	.196	.636**	.408*	1	.071	-.005	.311	.593**
	Sig. (2-tailed)	.378	.300	.250	.299	.000	.025		.710	.980	.094	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.8	Pearson Correlation	.737**	.613**	-.035	.017	.202	-.017	.071	1	.071	.118	.506**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.853	.928	.284	.928	.710		.710	.534	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.9	Pearson Correlation	.010	.196	.402*	.196	.010	.106	-.005	.071	1	.311	.422*
	Sig. (2-tailed)	.956	.300	.028	.299	.956	.578	.980	.710		.094	.020
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.10	Pearson Correlation	.264	.354	.224	.145	.075	.218	.311	.118	.311	1	.542**
	Sig. (2-tailed)	.159	.055	.235	.443	.692	.247	.094	.534	.094		.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total.Y	Pearson Correlation	.664**	.699**	.479**	.413*	.633**	.515**	.593**	.506**	.422*	.542**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.007	.023	.000	.004	.001	.004	.020	.002	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Uji Reliabilitas

1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.738	7

2. Variabel Pengendalian Akuntansi (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.682	9

3. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.739	10

C. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.02906049
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.090
	Negative	-.137
Test Statistic		.137
Asymp. Sig. (2-tailed)		.154 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

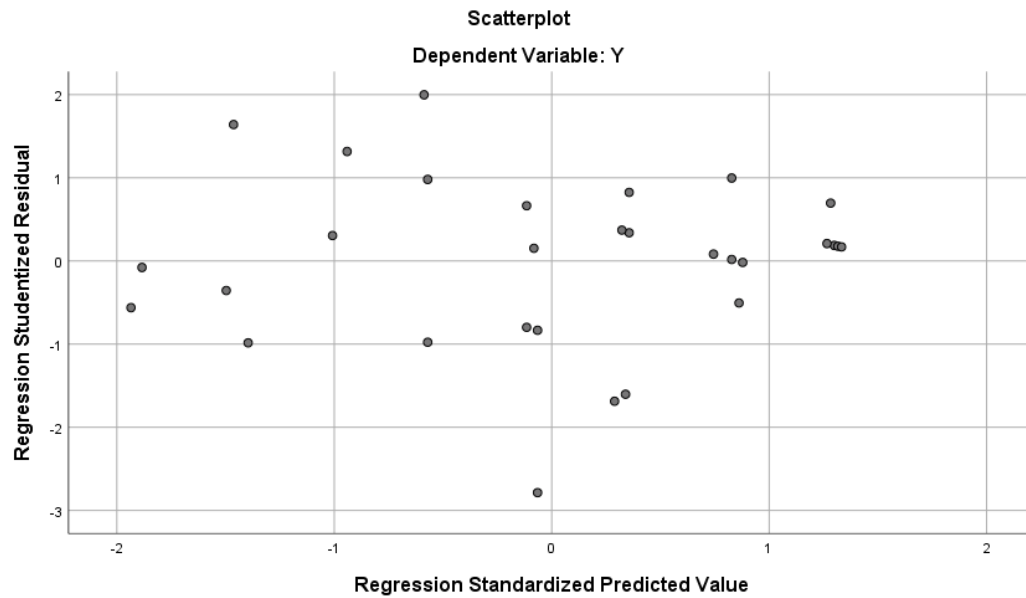
D. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	19.908	6.872		2.897	.007		
	X1	.640	.180	.567	3.562	.001	.987	1.013
	X2	.024	.175	.021	.135	.894	.987	1.013

a. Dependent Variable: Y

E. Uji Heteroskedastisitas



F. Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	19.908	6.872		2.897	.007		
	X1	.640	.180	.567	3.562	.001	.987	1.013
	X2	.024	.175	.021	.135	.894	.987	1.013

a. Dependent Variable: Y

G. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	57.404	2	28.702	6.491	.005 ^b
Residual	119.396	27	4.422		
Total	176.800	29			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran

H. Uji R²**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.570 ^a	.325	.275	2.10287

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN II

Tabel F, Tabel t, Tabel R

1. Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97

35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79

80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

2. Tabel t

Pr Df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

3. Tabel R

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230

27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

LAMPIRAN III
KUESIONER PENELITIAN

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENEKENDALIAN AKUNTANSI
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) (Studi Kasus
Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan)**

A. Petunjuk Pengisian

1. Bapak/Ibu cukup memberikan tanda ceklis (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia pada tabel sesuai dengan pendapat bapak/ibu dan mengisi bagian yang membutuhkan jawaban tertulis. Adapun keterangan alternatif jawaban dan bobot nilai yang dapat dipilih sebagai berikut:
 - a. SS = Sangat Setuju (4)
 - b. S = Setuju (3)
 - c. TS = Tidak Setuju (2)
 - d. STS = Sangat Tidak Setuju (1)
2. Semakin tinggi tingkat kesetujuan Bapak/Ibu pada pernyataan tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian ini.
3. Setelah mengisi kuesioner ini mohon bapak/ibu dapat mengembalikan kembali pada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.

B. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Usia : <25 Tahun 25-35 Tahun
 36-50 Tahun >50 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMA D3
 S1 S2
 S3 Lainnya
5. Jabatan :
6. Lama Bekerja : < 5 Tahun 5-10 Tahun
 5-15 Tahun >15 Tahun

I. Kejelasan Sasaran Anggaran

No	Pertanyaan	Penilaian			
		STS	TS	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pada instansi tempat saya bekerja, kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefiniskan dengan jelas, detail dan menyeluruh.				
2	Pada instansi tempat saya bekerja, tujuan rencana kerja dan anggaran telah disesuaikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).				
3	Pada instansi tempat saya bekerja, sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas, spesifik dan terstruktur.				
4	Pada instansi tempat saya bekerja, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran (RBA).				
5	Pada instansi tempat saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang dapat membantu atau mendukung tujuan-tujuan instansi secara efektif dan efisien.				
6	Tempat instansi saya bekerja, jumlah anggaran yang disusun sama dengan jumlah anggaran yang direalisasikan serta digunakan untuk mencapai tujuan instansi secara efektif dan efisien.				
7	Pada instansi tempat saya bekerja, pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan SOP yang berlaku berdasarkan kualitas, partisipasi dan penempatan sesuai dengan tugas yang diberikan.				

II. Pengendalian Akuntansi

No	Pernyataan	Penilaian			
		STS	TS	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pada instansi tempat Saya bekerja, audit atau pemeriksaan intern digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				
2	Pada instansi tempat Saya bekerja, evaluasi yang sistematis dan terjadwal tidak digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				
3	Pada instansi tempat Saya bekerja, penetapan target anggaran digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				
4	Pada instansi tempat Saya bekerja, rencana				

	jangka pendek dan jangka panjang digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				
5	Pada instansi tempat Saya bekerja, transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.				
6	Setiap transaksi yang terjadi pada instansi tempat Saya bekerja telah didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.				
7	Pada instansi tempat Saya bekerja, setiap transaksi telah dicatat dalam buku catatan akuntansi.				
8	Pada instansi tempat Saya bekerja, catatan akuntansi dijaga untuk tetap “ <i>up-to-date</i> ”.				
9	Pada instansi tempat Saya bekerja, laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan.				

III. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Pernyataan	Penilaian			
		STS	TS	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pada instansi tempat Saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu program telah dimengerti oleh semua aparat/pegawai dan pemimpin.				
2	Visi dan misi program instansi tempat Saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.				
3	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.				
4	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.				
5	Pada instansi tempat Saya bekerja, dilakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan.				
6	Tempat instansi Saya bekerja, telah dilakukan pengecekan terhadap jalannya program/kegiatan yang sedang dilaksanakan.				
7	Pada instansi tempat Saya bekerja, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.				
8	Kegiatan/program yang disusun oleh instansi				

	tempat Saya bekerja telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.				
9	Pada instansi tempat Saya bekerja, LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.				
10	Pada instansi tempat Saya bekerja, terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.				

**LAMPIRAN IV
DATA KUESIONER**

No	Variabel 1 (X1)							Tot al	Variabel 2 (X2)									Tot al	Variabel Y										Tot al
	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7		X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5	X2. 6	X2. 7	X2. 8	X2. 9		Y1. 1	Y1. 2	Y1. 3	Y1. 4	Y1. 5	Y1. 6	Y1. 7	Y1. 8	Y1. 9	Y1.1 0	
1	4	4	3	4	4	4	3	26	3	3	3	4	4	3	4	4	4	32	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
2	4	4	4	3	4	3	4	26	3	3	3	4	4	3	4	4	4	32	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	38
3	4	4	4	4	4	3	4	27	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	38
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	3	4	4	3	4	4	4	34	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
5	4	4	3	4	3	3	3	24	3	3	3	3	4	4	3	4	4	31	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	34
6	4	4	4	2	4	3	4	25	3	3	3	4	4	3	4	3	4	31	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	38
7	4	4	4	4	4	3	4	27	4	3	4	4	3	4	3	4	4	33	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	38
8	4	4	4	3	4	3	3	25	3	4	3	4	4	3	4	4	4	33	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	37
9	4	4	4	3	3	3	4	25	4	3	3	4	4	3	3	3	4	31	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	35
10	4	3	3	4	3	3	4	24	3	3	4	3	4	3	4	4	3	31	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	38
11	3	3	4	3	4	3	3	23	3	4	3	3	3	4	4	4	4	32	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	36
12	3	4	4	2	3	3	3	22	3	4	3	3	4	4	3	4	4	32	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38
13	3	4	3	2	4	3	3	22	3	4	3	3	3	4	3	3	4	30	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	34
14	3	3	4	4	4	4	4	26	3	4	3	3	3	3	3	4	4	30	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	38
15	4	4	4	3	3	3	4	25	4	4	3	4	4	4	3	4	4	34	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31
16	3	4	4	3	4	4	4	26	3	3	4	4	4	3	3	4	3	31	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	34
17	3	3	4	3	3	4	4	24	3	3	3	4	3	3	3	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	3	4	4	4	4	3	3	25	4	4	3	4	4	4	4	4	3	34	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	35
19	3	3	3	3	3	3	4	22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	33
20	3	3	3	3	3	3	3	21	3	4	3	3	4	3	3	4	4	31	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	33

21	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	4	4	4	3	4	4	4	34	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	34
22	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	37
23	4	3	3	3	3	3	4	23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38
24	4	4	4	3	4	3	4	26	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	34
25	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	38
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
27	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
28	4	4	4	4	4	3	4	27	3	4	3	3	4	4	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	4	4	4	4	4	4	28	3	4	4	4	3	3	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	4	4	4	4	4	4	4	28	3	4	3	4	3	4	3	4	4	32	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Atikah Hasanah
Nim : 0502173439
Tempat Tanggal Lahir: Medan, 31 Agustus 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Jamin ginting, gg medan area no.31

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Yayasan Pendidikan Islam Tahun 2010
2. Tamatan SMP Nurul Hasanah Tahun 2013
3. Tamatan SMA Negeri 15 Medan Tahun 2016
4. Tamatan Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI DAN PENGALAMAN KEGIATAN

1. Kelompok karya ilmiah remaja SMA N 15 Medan (2015-2016)
2. Remaja Mesjid Al-Hasanah Padang Bulan (2017-2020)
3. Himpunan Mahasiswa Islam (2017-2018)
4. Kelompok Studi Ekonomi Islam Universal Islamic Economics (KSEI UIE) UINSU (2018)